

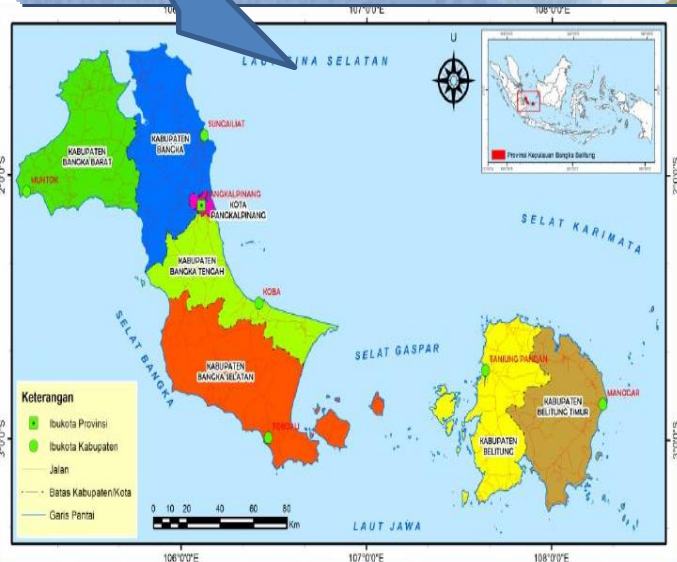
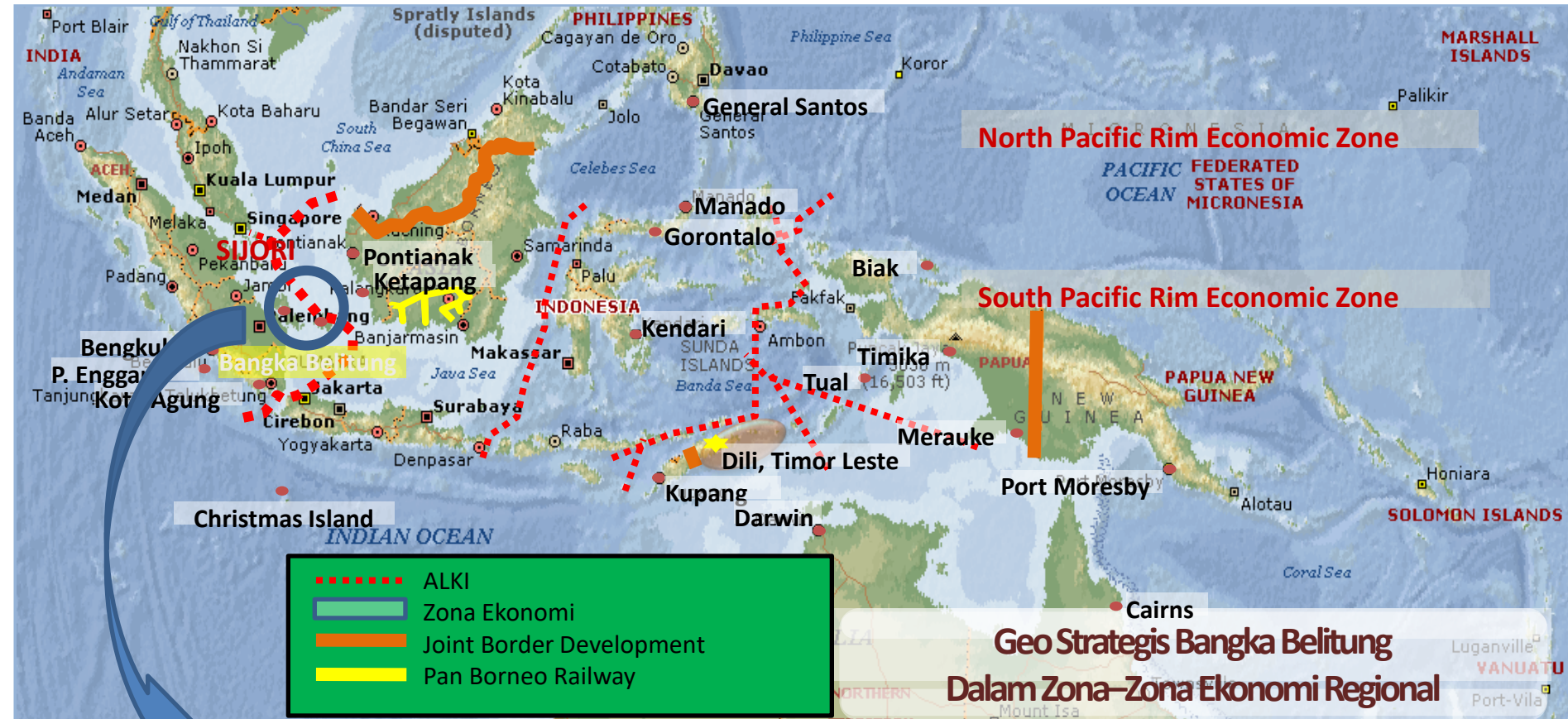


POTRET PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KAPTEN PILAR

Pangkalpinang, 02 Juli 2020



GAMBARAN UMUM PROV KEP. BANGKA BELITUNG

- ❖ Luas Daratan : 16.424,14 km² (20,10% of Total)
- ❖ LUAS PERAIRAN 65.301 km² (79,90% of Total)
- ❖ JUMLAH PENDUDUK (2017) ± 1.430.865 JIWA (BPS)
- ❖ TERDIRI DARI 6 KABUPATEN DAN 1 KOTA
- ❖ PANJANG GARIS PANTAI 1.295,83 KM
- ❖ JUMLAH PULAU 555 BUAH
- ❖ Jumlah Desa Pesisir: 188 Desa
- ❖ PDRB Perikanan: Rp. 4.580.034.946.260,-

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas dalam mendukung Prioritas Gubernur

VISI : <i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>			
MISI 1 : Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan	Wilayah berbasis kelautan dan perikanan yang dapat dibangun dan dikelola dengan baik	Membangun dan mengelola wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembangunan dan Pengelolaan berbasis Wilayah dengan mengikutsertakan lintas perangkat daerah dan stakeholder
Meningkatkan Pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang di awasi	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha bidang kelautan dan perikanan	Mengendalikan dan mengawasi usaha di bidang kelautan dan perikanan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Meningkatnya Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan di Prov. Kep. Babel	Meningkatkan kegiatan produksi di sektor kelautan dan perikanan dari hulu sampai dengan hilir untuk peningkatan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Pemanfaatan potensi ekonomi lokal berbasis Kelautan dan Perikanan
		Meningkatkan Standarisasi Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan Pembangunan Berbasis Industri di Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dengan skala prioritas	Sarana dan prasarana yang diadakan adalah untuk peningkatan produktifitas yang berkesinambungan

PENGAWASAN MENJADI SALAH SATU FOKUS UTAMA DINAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS GUBERNUR

INDIKATOR KINERJA SASARAN / UTAMA

2018-2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan per kapita (Juta Rupiah)	76,54	77,74	78,94	80,14	81,34
2.	Persentase Wilayah perairan Bangka Belitung yang diawasi (%)	15	18	20	23	25
3.	Persentase Wilayah berbasis kelautan dan Perikanan yang terbangun dan terkelola (%)	100	100	100	100	100

TARGET PENGAWASAN MENJADI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS, SEHINGGA DIPERLUKAN KOORDINASI DENGAN SEMUA STAKE HOLDER TERMASUK DENGAN LANAL BABEL TERKAIT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASANNYA.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2018-2022

No	Indikator	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
1	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)		65	70	75	80	85	85

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2018-2022

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Akhir
1.	Pengawasan sumber daya kelautan	Jumlah hari operasi kapal pengawas (Hari Operasi)	150	160	170	180	180	840
		Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pelaku Usaha)	30	35	40	45	50	200
2.	Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Pokmaswas aktif (Kelompok)	50	55	60	65	70	70
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Taat terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pelaku Usaha)	60	65	70	75	80	80
3.	Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di kab/kota yang akuntabel (Berkas)	7	10	12	14	16	59

RINCIAN KEGIATAN PENGAWASAN SAAT PANDEMI COVID-19

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Ket
1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan			
Pagu Anggaran	912.177.490	525.092.995	- 42,44%
Keluaran:			
1. Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas	1. 50 Hari Operasi	1. 23 Hari Operasi	Sisa 13
2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan per UU yang berlaku	2. 40 Pelaku Usaha	2. 0 Pelaku Usaha	100%
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan			
Pagu Anggaran	204.745.500	106.196.000	- 48%
Keluaran:			
1. Jumlah POKMASWAS Aktif	1. 60 Kelompok	1. 30 Kelompok	-50%
2. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang taat terhadap ketentuan Peraturan Per UU yang berlaku	2. 70 Pelaku Usaha	2. 70 Pelaku Usaha	
3. Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan			
Pagu Anggaran	230.455.240	0	-100%
Keluaran:			
Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu	3 Berkas Perkara	0 Berkas Perkara	-100%

Kondisi Sumber Daya Manusia PSDKP

No.	SDM	Jumlah	Ket
1.	Kepala Seksi	3	☐ Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan: Sandi Laswardi, S.TP ☐ Kasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan: Helmina, S.IP, M.M ☐ Kasi Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan: Akhmad Jaya Firdaus, S.Pi
2.	Pengawas Perikanan	9	☐ 4 Pengawas sudah ditetapkan Menteri: → H. Alfino Nedi, S.Pi, M.Si = Ahli Madya; Kemat Taj, S.Kel = Ahli Muda → M. Sobirin, SP = Ahli Muda; Vinia Fitriyani, S.Si = Ahli Muda ☐ 4 Pengawas secara fungsional: → Retfi Wiseli, S.Pi = Ahli Muda; Haris Usman, SP= Ahli Muda → Ufriyadi Saputra, S.Pi = Ahli Pertama; Nuryani, S.PKP = Pelaksana Lanjutan ☐ 1 Calon Pengawas (PNS): Dedeh Priyatna Sari (Ahli Pertama)
3.	PPNS	16	☐ Provinsi (4 Orang): Sularsono, S.St.Pi: Kasi di PUPBPHP; Kemal Taj, S.Kel: Pengawas Perikanan; Haris Usman, SP (mati): Pengawas Perikanan; Akhmad Jaya F, S.Pi: Kasi PTPKP ☐ Bangka (1 Orang): KTA Mati; Bangka Barat (2 Orang); KTA Mati; Belitung (4 Orang): 3 KTA Mati, 1 orang dianulir karena lulusan SMA; Belitung Timur (1 Orang): pindah tugas dan dianulir karena lulusan SMA; Pangkalpinang (1 Orang): KTA Mati; Satwas SDKP Bangka (1 Orang); Satwas SDKP Belitung (1 Orang)
4	Staf Bidang	5	Maimuna Hayati; Gunawan, SH (Kapal); Rany Hambarsyah, A.Md, Arief Rianto (Polisi Khusus WP3K); Uli Sumanti (Honorar)
5.	ABK Kapal	4	Hardiansyah; Egi Prawira; Kusbianoro; Jupriyanto di Pangkalpinang
6.	POKMASWAS	94	yang aktif hanya 49 Kelompok (52,13%)

Kondisi Armada Kapal Pengawas Perikanan

No	Nama Kapal	Ukuran	Asal Kapal	Posisi Sandar	Kondisi	Keterangan
1	Kapal Pengawas SETUHUK	6 meter	Pemprov Babel	Dermaga Pos Kapal Pengawas DKP Prov. Kep. Babel	Rusak Berat	Pangkalpinang
2	Kapal Pengawas PIRANHA	12 meter	Pemprov Babel	Dermaga Pos Kapal Pengawas DKP Prov. Kep. Babel	Baik	Pangkalpinang
3	Kapal Pengawas ELANG LAUT	12 meter	Pemkab Bangka	Dermaga Pos Kapal Pengawas DKP Prov. Kep. Babel	Baik	Pangkalpinang
4	Kapal Pengawas SENTAK	12 meter	Pemkab Belitung	Dermaga Pos Kapal Pengawas DKP Prov. Kep. Babel	Baik	Pangkalpinang
5	Kapal Pengawas TODAK	12 meter	Pemkab Bangka Tengah	Dermaga Pos Kapal Pengawas DKP Prov. Kep. Babel	Rusak Berat	Pangkalpinang
6	Kapal Pengawas	12 meter	Pemkab Bangka Selatan	Dermaga Sadai	Rusak Berat	Bangka Selatan
7	Kapal Pengawas PARI	14 meter	Pemkab Belitung	Dermaga Dinas Perikanan Belitung	Baik	Belitung (Sudah Pinjam Pakai s.d. Tahun 2023).
8	Kapal Pengawas GROUPER	8 meter	Pemkab Belitung Timur	Dermaga Manggar	Rusak Berat	Belitung Timur

Untuk Kapal dalam kondisi Rusak Berat sudah diajukan Nota Dinas Ke Kadis untuk dilakukan Penghapusan

Gambar. Kapal Pengawas dari Bangka Selatan



Gambar. Kapal Pengawas GROUPER dari Belitung Timur



Gambar. Kapal Pengawas TODAK dari Bangka Tengah



Gambar. Kapal Pengawas SETUHUK di Pangkalpinang



Kondisi Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1.	Pos Pengawas	4	1 di Pangkalpinang; 1 di Belitung; 1 di Beltim (Pulau Nangka); dan 1 di Bangka
2.	Mobil Pengawas	5	4 di Kantor DKP Prov. Kep. Babel dan 1 di Belitung
3.	Motor Pengawas	10	di Kantor DKP Prov. Kep. Babel (belum didistribusikan)
4.	Senjata Air Softgun	3	1 Laras Panjang 2 Laras Pendek (1 Rusak)

OBJEK PENGAWASAN SDKP

1. kegiatan penangkapan ikan;
2. pembudidayaan ikan, pembenihan;
3. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
4. mutu hasil perikanan;
5. distribusi keluar masuk obat ikan;
6. Konservasi;
7. Pencemaran akibat perbuatan manusia;
8. Plasma nutfah;
9. Penelitian dan pengembangan perikanan; dan
10. Ikan hasil rekayasa genetika

Berdasarkan Pasal 66 – UU 45/2009 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)

PETA WILAYAH PERENCANAAN

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kecamatan
- Kabupaten
- Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas 12 Mil
- Garis Pantai

JARINGAN JALAN

- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Sebidak

PERAIRAN

- Sungai

BANGUNAN LAUT

- BAK
- Pelabuhan
- TUKS/TERBUK

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

Peta ini adalah hasil dari proses perencanaan wilayah yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Perencanaan Wilayah dan Kota (BPWK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta ini merupakan bagian dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta ini dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Perencanaan Wilayah dan Kota (BPWK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta ini dibuat pada tahun 2017.



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)**

PETA WILAYAH PERENCANAAN



0 12,5 25 50 75 100
Kilometer

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Geografis
Datum Horizontal	: World Geodetic System (WGS) 1984



LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kecamatan
- Kabupaten
- Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas 12 MI
- Garis Pantai

JARINGAN JALAN

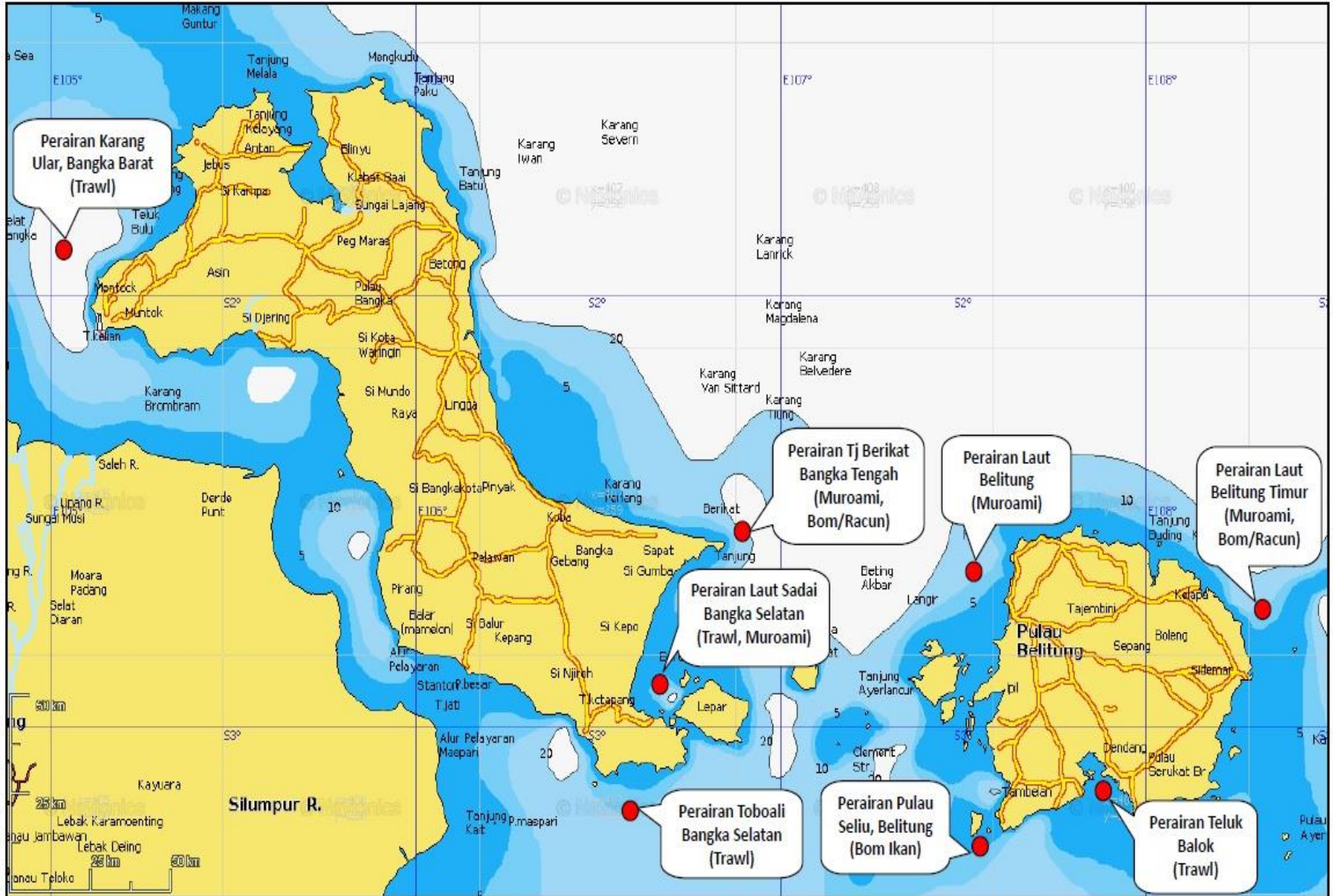
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Bypass

PERAIRAN

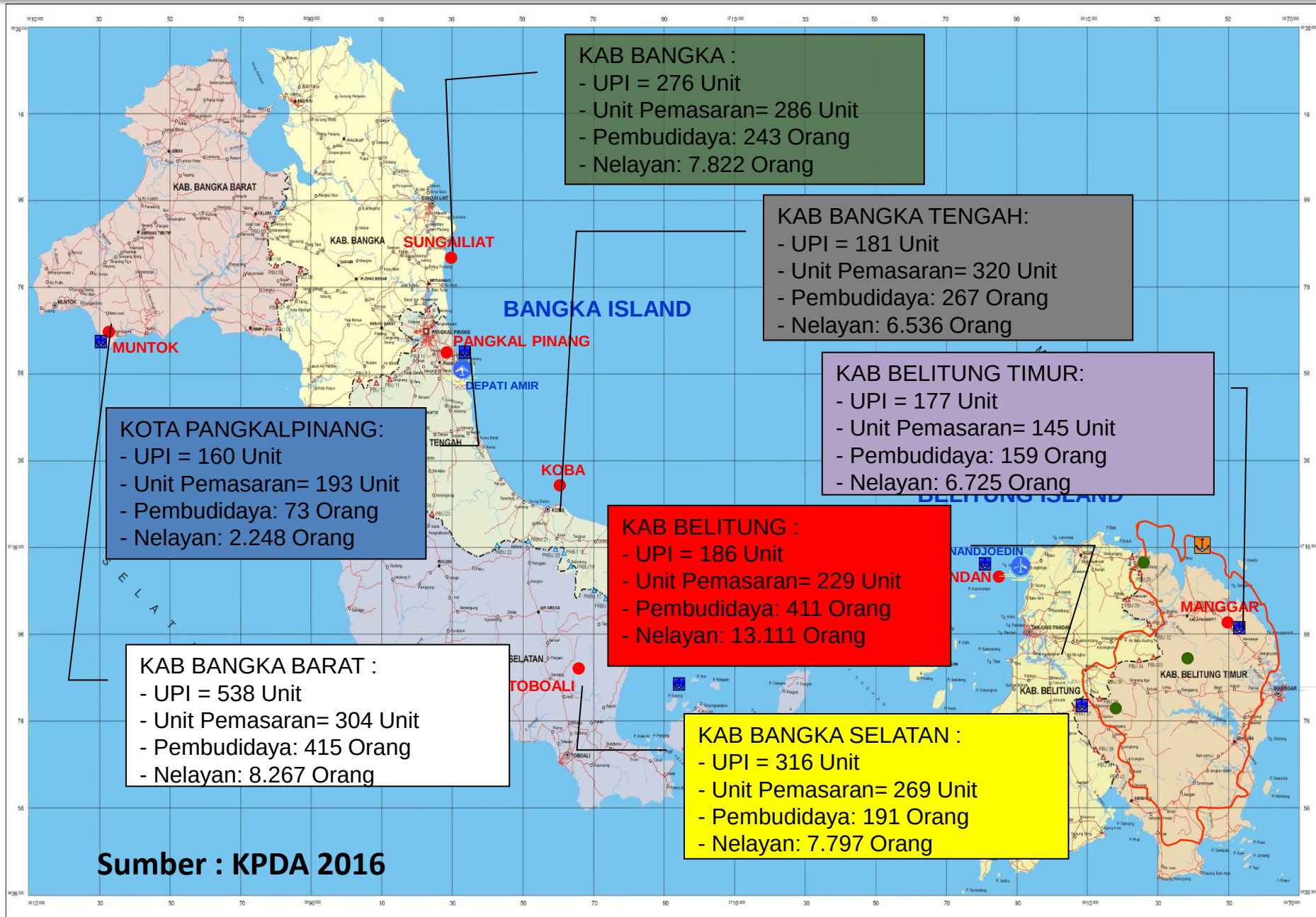
- BANGUNAN LAUT**
-  BAKT
 -  Pelabuhan
 -  TUKOTERSUS

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

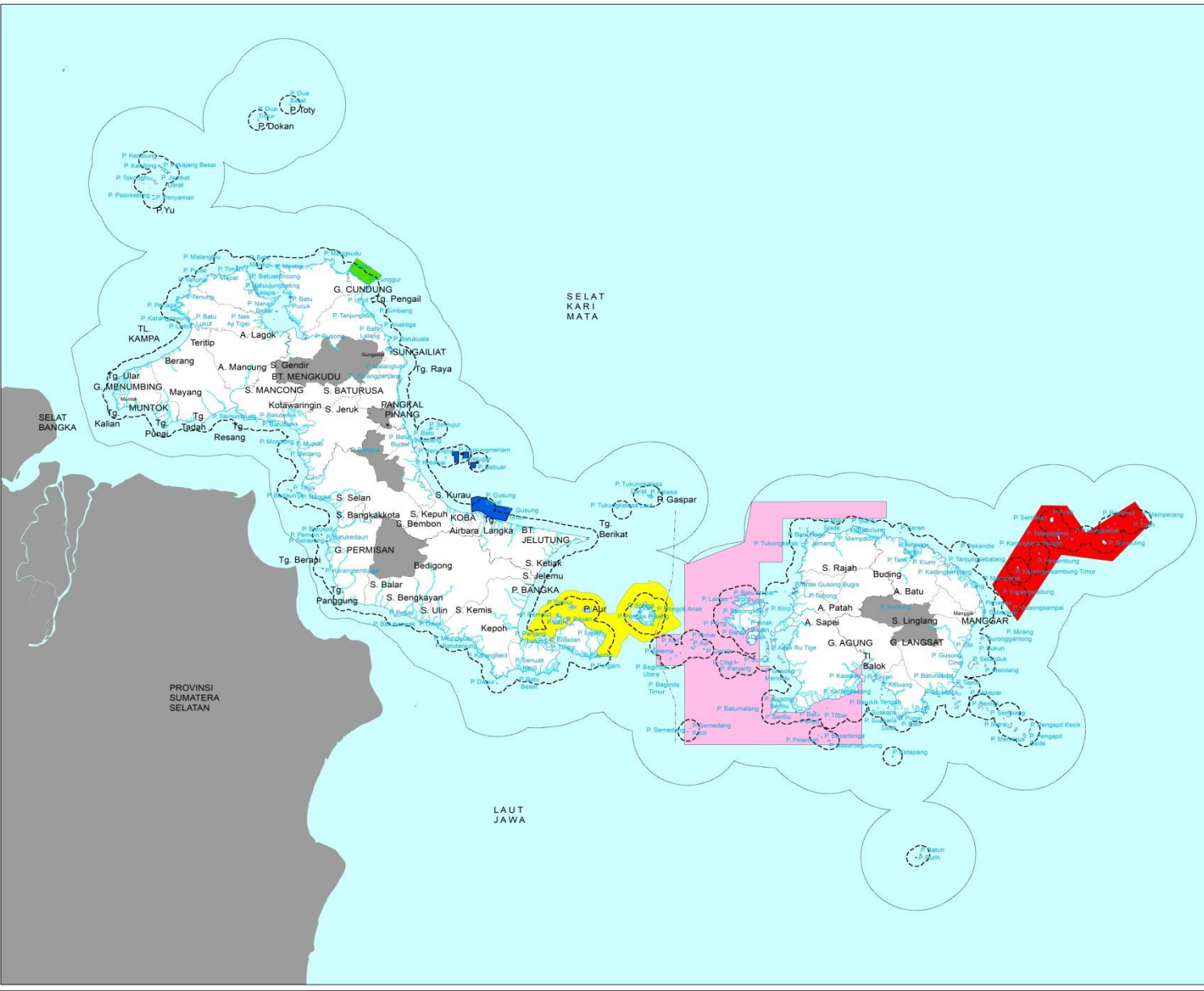
[illegible]



PETA AKTIVITAS PEMANFAATAN PSDKP BABEL



PETA RENCANA ALOKASI RUANG KAWASAN KONSERVASI BABEL



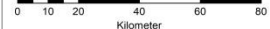
**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)**

PETA RENCANA ALOKASI RUANG



Skala 1:750,000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum Horizontal : World Geodetic System (WGS) 1984

INSET PETA



LEGENDA

- ADMINISTRASI**
- Kecamatan
 - Kabupaten
 - Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas 2 Mil
 - Batas 12 Mil
 - Garis Pantai
 - Kecamatan Non-Pesisir
 - Kecamatan Pesisir

- JARINGAN JALAN**
- Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Selspek
- PERAIRAN**
- Sungai

Kawasan Konservasi Perairan

- KKP Bangka
- KKP Bangka Tengah
- KKP Bangka Selatan
- KKP Belitung
- KKP Belitung Timur

KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA

Peta ini bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-garis Batas Administrasi Nasional dan Internasional
- Peta Rupa Bumi Indonesia Operasional dan Batas Informasi Geospasial Tahun 2017
- Data Garis Pantai KOPRI BHL 2017
- Data RZWP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014
- Data Garis Laut (WGS 1984)
- Data Raster Luncas (LULU)
- Data Raster Luncas (LULU)
- Analisis Data RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Permasalahan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan modus/jenis *illegal fishing* yang sering dilakukan, antara lain:
 - ☐ Penggunaan alat tangkap terlarang;
 - ☐ Melanggar daerah penangkapan ikan, jalur penangkapan ikan, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai;
 - ☐ Melakukan penangkapan/pengangkutan ikan tanpa memiliki dokumen;
 - ☐ Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, peledak, alat, cara, bangunan yang membahayakan.
2. Masih banyaknya usaha perikanan budidaya dan pengolahan yang belum memiliki Izin usaha perikanan;
3. Konflik dengan Pertambangan Illegal
4. Terbatasnya SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ada, mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi oleh Pemerintah Provinsi.

Terima Kasih

Laut Rumah Kedua . . .



*Indonesia Hebat . . .
Kelautan dan Perikanan Kuat*

One Team. One Spirit. One Goal